

**PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN,
AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN, PENGENDALIAN
INTERNAL, DAN PERTANGGUNGJELASAN DANA OTONOMI
KHUSUS TERHADAP KINERJA UNIT**

(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Supiori)

**Prawestri Rahayu
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
prawestrirahayu15@gmail.com**

ABSTRAK

This study aims to analyze the influence of budgetary participation, financial statement accessibility, internal control, and special autonomy fund accountability to performance on local government work unit in Supiori Regency. Sample in this study involves financial sub-department's employees of local government work unit in Supiori Regency. This study uses primary data collected using questionnaires on 61 respondents selected by purposive sampling. Analysis tool used in this study is the SPSS.

Based on the analysis that have been made the results are the financial statement accessibility, internal control, and special autonomy fund accountability are positive significantly effect to the unit performance. Budgetary participation have not effect to the unit performance.

Keywords : budgetary participation, financial statement accessibility, internal control, special autonomy fund accountability, performance

I. PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Otonomi khusus merupakan bentuk kepercayaan dari pemerintah dengan memberikan wewenang khusus kepada suatu daerah untuk mengatur serta mengurus kepentingan rumah tangganya dengan tetap menjadikan aspirasi serta hak masyarakat sebagai dasar pelaksanaan. Otonomi khusus bagi Provinsi Papua dibahas pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Latar belakang diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 adalah pemerintah yang belum dapat menyelesaikan berbagai masalah di Papua. Permasalahan yang dimaksud terdiri atas berbagai bidang.

Pemerintah selaku sektor publik yang diberikan amanah untuk mengelola dana publik harus dapat bekerja secara ekonomis, efisien dan efektif agar pelayanan publik dapat berjalan dengan optimal. Selaku pemilik dana (*stakeholders*), masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara jelas mengenai segala aktivitas pengelolaan dana (Hayuwati, 2018).

Tidak sedikit dana yang dialokasikan oleh pemerintah untuk otonomi khusus di Papua. Disebutkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, dana otonomi khusus Papua mencapai Rp8,0 triliun dengan perincian untuk Papua sebesar Rp5,6 triliun dan Papua Barat sebesar Rp2,4 triliun. Dana tersebut belum termasuk Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) sebesar Rp2,4 triliun dan untuk Papua Barat sebesar Rp1,6 triliun.

Endi (2018) Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) dalam situs CNN Indonesia mengatakan bahwa permasalahan mendasar dari pelaksanaan otonomi khusus Papua yaitu lemahnya manajemen internal yang menyebabkan tata kelola anggaran menjadi amburadul. Selain itu, KPPOD melihat elit politik setempat menganggap dana otonomi khusus seperti uang pribadi yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Masalah ini menunjukkan bahwa pengendalian internal di Provinsi Papua belum berjalan secara transparan dan akuntabel.

Penelitian ini berfokus pada kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Supiori. Kabupaten Supiori merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua, pemekaran dari Kabupaten Biak dan baru

diresmikan pada tahun 2003 silam. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan menemukan bahwa kinerja pengelolaan dana otonomi khusus di Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2015 dan 2016 tidak efektif (BPK, 2018).

Dana otonomi khusus tidak sedikit jumlahnya, apabila dikelola dengan kinerja yang baik tentu akan membantu daerah pemekaran untuk mempercepat pemerataan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setelah penemuan tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) memberikan penguatan kapasitas kepada para kepala SKPD agar dapat melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Tujuannya agar para pegawai dapat meningkatkan kinerjanya serta efisiensi dalam penggunaan anggaran dapat tercapai. Pada bulan November 2018, Kemenpan RB menjadikan Kabupaten sebagai percontohan reformasi birokrasi.

RUMUSAN MASALAH

1. Apakah terdapat pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja di Kabupaten Supiori?
2. Apakah terdapat pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap kinerja di Kabupaten Supiori?
3. Apakah terdapat pengaruh pengendalian internal terhadap kinerja di Kabupaten Supiori?
4. Apakah terdapat pengaruh pertanggungjawaban otonomi khusus terhadap kinerja di Kabupaten Supiori?

PENURUNAN HIPOTESIS

1. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Unit

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ulupui (2005), menguji mengenai hubungan antara partisipasi anggaran dengan kinerja dinas yang ada di Kabupaten Bandung. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa partisipasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Yanida, dkk (2013) melakukan penelitian dan menemukan hasil bahwa partisipasi pegawai dalam proses penyusunan anggaran di SKPD Palangkaraya dapat meningkatkan kinerja pegawai. Pemberian kesempatan kepada pegawai dalam menentukan target anggaran, akan meningkatkan komitmen serta tanggungjawab pada diri pegawai tersebut sehingga kinerja juga akan meningkat. Nurhalimah (2013) juga pernah meneliti mengenai pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparatur perangkat daerah dan memperoleh hasil bahwa aparatur daerah di Pemerintah Aceh telah ikut berpartisipasi serta berpengaruh terhadap kinerja.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Poerwati (2001) menemukan hasil yang berbeda, partisipasi anggaran tidak berpengaruh secara langsung terhadap terhadap kinerja manajerial. Kemungkinan ada variabel lain yang perlu dipertimbangkan dalam hubungan partisipasi anggaran terhadap kinerja.

Pelibatan dalam penyusunan anggaran membuat pihak-pihak tersebut paham akan target yang ingin dicapai bersama. Selain itu, rasa

tanggungjawab yang ada pada pihak tersebut akan meningkat saat merasa pendapat mereka dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Rasa tanggungjawab yang tinggi untuk mencapai tujuan, akan membuat para pihak yang dilibatkan dalam penyusunan anggaran meningkatkan kualitas kinerja mereka.

H₁: Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja unit

2. Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Kinerja Unit

Pemerintah selaku penerima amanah berupa pengelolaan dana publik, selain bertanggung jawab mengelola dana juga memiliki kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan mengenai pengelolaan dana tersebut. Penyajian laporan keuangan kepada publik dilakukan dengan mengembangkan sistem informasi keuangan daerah. Bukan sekedar menyajikan laporan keuangan, pemerintah perlu memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses laporan tersebut.

Hariyati (2013) melakukan penelitian pada 42 karyawan di Regional Investment Agency Kota Samarinda dan menemukan hasil bahwa transparansi berpengaruh terhadap kinerja. Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Setiyanningrum (2017) yang memperoleh hasil bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja berbasis *Value for Money*. Transparansi menjadikan masyarakat lebih kritis terhadap kejadian-kejadian yang ada, sehingga transparansi dapat dijadikan alat pengendalian terhadap kinerja pemerintah.

Kemudahan mengakses laporan keuangan oleh publik menyebabkan semakin mudah juga publik mengetahui bagaimana kinerja pemerintah. Kinerja yang buruk akan lebih mudah juga terdeteksi. Hal tersebut menjadikan publik sebagai pengawas kinerja pemerintah. Oleh sebab kinerja dapat dinilai dan diawasi oleh publik, maka pemerintah tentu akan meningkatkan kinerjanya.

H₂ : Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja unit

3. Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kinerja Unit

Pengendalian internal merupakan sistem yang secara terus menerus atau otomatis antara pimpinan dan pegawai. Pemimpin memberikan keyakinan kepada pegawai akan tercapainya tujuan organisasi. Pengendalian internal memastikan segala aktifitas atau kegiatan yang terlaksana sesuai dengan apa yang direncanakan.

Peneletian terdahulu yang menguji mengenai hubungan antara pengendalian dan kinerja dilakukan oleh Nasir (2011) memperoleh hasil bahwa pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah. Selain itu, agar pengendalian dapat berjalan efektif maka perlu adanya komitmen diantara pihak terkait. Komitmen tersebut dimaksudkan agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan baik. Selain itu Herman (2013) melakukan penelitian dan memperoleh hasil bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan. Semakin baik sistem pengendalian internal maka

kecurangan yang ada dilingkungan pemerintahan akan semakin rendah. Rendahnya kecurangan pada suatu pemerintahan menunjukkan bahwa kinerja pemerintah tersebut bagus.

H₃ : Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja unit

4. Pengaruh Pertanggungjawaban Otonomi Khusus terhadap Kinerja Unit

Pertanggungjawaban otonomi khusus adalah bentuk tanggungjawab pemerintah selaku penerima amanah berupa dana otonomi khusus menggunakan laporan keuangan sebagai media pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan mengenai segala aktivitas dari penerima amanah dalam mengelola dana yang telah dititipkan oleh pemberi amanah. Pertanggungjawaban merupakan hak yang dapat diminta oleh pemberi amanah kepada penerima amanah (Mardiasmo, 2009).

Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Hariyati (2017) memperoleh hasil bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja badan penanaman modal daerah. Selain itu Putra (2013) melakukan penelitian dan memperoleh hasil bahwa akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kinerja pemerintah daerah dapat dilihat dalam laporan kinerja. Pada laporan tersebut akan terlihat sejauhmana pemerintah daerah menjalankan kegiatan berdasarkan apa yang telah direncanakan. Peningkatan kinerja memerlukan akuntabilitas publik.

Dengan adanya akuntabilitas publik maka kinerja pemerintah daerah dapat dinilai.

Laporan keuangan memungkinkan publik mengetahui keberhasilan maupun kegagalan pemerintah dalam mengelola dana otonomi khusus. Publik dapat melihat apakah dana otonomi khusus telah digunakan sebaik mungkin dalam upaya menyejahterakan masyarakat. Secara tidak langsung pertanggungjawaban memperbaiki kinerja. Pemerintah tentu tidak mau terlihat gagal. Oleh karena itu, pemerintah akan meningkatkan kinerja dalam mengelola dana otonomi khusus.

H₄ : Pertanggungjawaban otonomi khusus berpengaruh positif terhadap kinerja unit

II. METODE PENELITIAN

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Subyek atau populasi pada penelitian ini adalah Kabupaten Supiori. Kabupaten Supiori merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Papua. Objek atau sampel dari penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Supiori. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif yang dirancang untuk pengujian hipotesis asosiatif. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan teknik angket/kuesioner tertutup.

DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL

Variabel pada penelitian ini terdiri atas 4 variabel independen dan 1 variabel dependen. Variabel-variabel penelitian tersebut akan diukur

menggunakan skala likert 1-5 bertipe skala interval, dengan skor 1 sebagai nilai terendah dan skor 5 sebagai nilai tertinggi. Definisi operasional dari masing-masing variabel sebagai berikut :

1. Partisipasi penyusunan anggaran adalah keterlibatan pihak-pihak yang mendapat dampak anggaran dalam penyusunan anggaran. Pada proses ini manajemen tingkat bawah dilibatkan dan mempunyai pengaruh dalam penyusunan anggaran (Brownell, 1982) Instrumen penelitian meminjam dari instrumen penelitian yang dikembangkan Hayuwati (2018). Pengukurannya menggunakan 8 item pertanyaan.
2. Aksesibilitas laporan keuangan adalah kemudahan pengguna dalam mendapatkan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Instrumen penelitian meminjam dari instrumen penelitian yang dikembangkan Hayuwati (2018). Pengukurannya menggunakan 8 pertanyaan.
3. Pengendalian internal adalah pemanfaatan sumberdaya yang tersedia untuk meningkatkan, mengarahkan dan mengawasi segala aktivitas guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses pengendalian internal terjadi secara berkelanjutan pada semua elemen organisasi. Instrumen penelitian meminjam dari instrumen penelitian yang dilakukan Hayuwati (2018). Pengukurannya menggunakan 17 pertanyaan. Terdapat beberapa dimensi dalam instrumen penelitian ini.
4. Pertanggungjawaban dana otonomi khusus adalah bentuk tanggungjawab penerima amanah kepada pihak yang memberikan amanah dengan

menyediakan informasi mengenai pertanggungjawabannya kepada pihak yang berhak atas informasi tersebut. Instrumen penelitian didasarkan penelitian yang dikembangkan Hayuwati (2018). Pengukurannya menggunakan 11 pertanyaan.

5. Kinerja adalah tingkat pencapaian pegawai dalam upaya mewujudkan tujuan. Instrumen penelitian menggunakan instrumen yang dikembangkan dari penelitian Anugriani (2014) dan Setiyanningrum (2017) dalam Hanifah (2018). Pengukurannya menggunakan 8 pertanyaan.

UJI ASUMSI KLASIK

1. Uji normalitas.

Uji normalitas berguna untuk mengetahui data yang telah dikumpulkan berdistribusi atau diambil dari populasi yang normal. Residual dianggap menyebar normal apabila memenuhi syarat nilai sig lebih besar dari 5%. (Nazaruddin, 2017)

2. Uji multikolinearitas.

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji adanya korelasi antar variabel bebas pada model regresi linear berganda. Apabila nilai VIF pada tabel menunjukkan kurang dari 10 maka dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas diantara variabel independent.

3. Uji heteroskedastisitas.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual untuk semua pengamatan. Apabila

nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka dianggap tidak terdapat heteroskedastisitas.

UJI ANALISIS DATA

Hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan analisis regresi linier berganda. Analisis ini berguna untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hubungan tersebut dirumuskan dalam model persamaan sebagai berikut:

$$K = \beta_0 + \beta_1\text{PPA} + \beta_2\text{ALK} + \beta_3\text{PI} + \beta_4\text{PDOS} + \text{eror}$$

keterangan:

β_0 : konstanta

$\beta_1\beta_2\beta_3$: koefisien regresi

PPA : partisipasi penyusunan anggaran

ALK : aksesibilitas laporan keuangan

PI : pengendalian internal

PDOS : pertanggungjawaban dana otonomi khusus

K : kinerja

1. Uji koefisien determinasi (R^2).

Koefisien determinasi adalah alat untuk mengukur sejauh mana model mampu menerangkan variasi variabel dependen. Semakin kecil nilai R^2 , maka semakin terbatas juga kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

2. Uji simultan (Uji F).

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikansi menunjukkan kurang dari 0,05 maka disimpulkan variabel dependen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

3. Uji signifikansi parameter individual (uji t).

Uji beda t-test digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh variabel independen yang dilakukan dalam penelitian ini mempengaruhi individual variabel dependen secara parsial. Apabila nilai probabilitas pada level signifikansi $> 0,05$, variabel independen dianggap tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Apabila nilai probabilitas pada level signifikansi $< 0,05$, variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Apabila nilai *Unstandardized Coefficient B* positif maka variabel independen dinyatakan berpengaruh positif terhadap variabel dependen.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

UJI ASUMSI KLASIK

1. Uji Normalitas

Pada penelitian ini, nilai sig 0,357. Nilai ini lebih dari nilai yang telah ditentukan sebagai syarat. Kesimpulannya nilai residualnya berdistribusi secara normal.

Tabel 3.1.
Normalitas

		Unstandardized Residual
N		61
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.31128839
	Absolute	.119
Most Extreme Differences	Positive	.114
	Negative	-.119
Kolmogorov-Smirnov Z		.926
Asymp. Sig. (2-tailed)		.357

Sumber : data primer yang diolah 2018

2. Uji multikolinearitas.

Tabel 3.2.
Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Partisipasi Penyusunan Anggaran	0,556	1,799	Bebas Multikolinearitas
Aksesibilitas Laporan Keuangan	0,628	1,592	Bebas Multikolinearitas
Pengendalian Internal	0,309	3,237	Bebas Multikolinearitas
Pertanggungjelasn Dana Otonomi Khusus	0,270	3,708	Bebas Multikolinearitas

Sumber : data primer yang diolah 2018

Sebagaimana yang tertera pada tabel 4.11 seluruh variabel pada penelitian ini memiliki nilai *tolerance* > 0,1 dan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* < 10. Seluruh variabel memenuhi syarat sehingga dinyatakan bebas multikolinearitas.

3. Uji heteroskedastisitas.

Tabel 3.3.
Heteroskedastisitas

Variabel	Nilai Sig	Keterangan
Partisipasi Penyusunan Anggaran	0,340	Bebas Heteroskedastisitas
Aksesibilitas Laporan Keuangan	0,090	Bebas Heteroskedastisitas
Pengendalian Internal	0,219	Bebas Heteroskedastisitas
Pertanggungjelasn Dana Otonomi Khusus	0,432	Bebas Heteroskedastisitas

Sumber : data primer yang diolah 2018

Pada penelitian ini, seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi lebih dari nilai yang disyaratkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen bebas dari heteroskedastisitas.

UJI HIPOTESIS

Tabel 3.4.
Hasil Uji Hipotesis

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	7.423	1.496		4.961	.000
PPA	.052	.043	.087	1.217	.229
ALK	.195	.055	.235	3.522	.001
PI	.130	.032	.381	3.998	.000
PDOK	.187	.053	.358	3.507	.001

a. Dependent Variable: Kinerja

Sumber : data primer yang diolah 2018

Hasil dari penelitian tersebut apabila dirumuskan menjadi :

$$K = 7,423 + 0,052 \text{ PPA} + 0,195 \text{ ALK} + 0,130 \text{ PI} + 0,187 \text{ PDOS} + \text{eror}$$

1. Uji koefisien determinasi (R^2).

Tabel 3.5.
Hasil Uji Keofisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.918 ^a	.843	.832	1.357

Sumber : data primer yang diolah 2018

Hasil pengujian determinasi ditunjukkan dalam tabel 4.14. Diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* 0,832 menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran, aksesibilitas laporan keuangan, pengendalian internal, dan pertanggungjelasan dana otonomi khusus dapat menjelaskan kinerja sebesar 83,2%. Sisanya 16,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti pada model penelitian ini.

2. Uji simultan (Uji F).

Tabel 3.6.
Hasil Uji Simultan

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	553.159	4	138.290	75.064	.000 ^b
1 Residual	103.169	56	1.842		
Total	656.328	60			

Sumber : data primer yang diolah 2018

Sebagaimana yang tertera pada tabel 4.15, diketahui nilai signifikansi 0,000. Nilai tersebut berada dibawah nilai yang disyaratkan 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan

bahwa variabel independen pada penelitian ini secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3. Uji signifikansi parameter individual (Uji t).

Hasil uji parsial pada masing-masing variabel dianalisis sebagai berikut:

a. Partisipasi penyusunan anggaran (X1).

Berdasarkan hasil pengujian yang ada pada tabel 3.4., diketahui bahwa nilai sig dari variabel partisipasi penyusunan anggaran adalah 0,229. Dapat disimpulkan partisipasi penyusunan anggaran (X1) tidak berpengaruh secara parsial terhadap kinerja (Y) atau dapat dikatakan hipotesis pertama (H₁) **ditolak**.

b. Aksesibilitas laporan keuangan (X2).

Seperti yang dapat dilihat pada tabel 4.13, variabel aksesibilitas laporan keuangan memiliki nilai sig 0,01. Nilai beta pada *Unstandardized Coefficients* 0,195. Sesuai hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja (Y), dengan kata lain hipotesis kedua (H₂) **diterima**.

c. Pengendalian internal (X3).

Nilai sig variabel pengendalian internal pada tabel 4.13 menunjukkan nilai 0,00. Nilai tersebut dibawah 0,05 yang disyaratkan dalam pengujian. Nilai beta pada *Unstandardized*

Coefficients menunjukkan 0,130. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal (X3) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja (Y), sehingga dapat dikatakan hipotesis ketiga (H₃) **diterima**.

d. Pertanggungjawaban dana otonomi khusus (X4).

Pada tabel 4.13 diketahui bahwa nilai sig untuk variabel pertanggungjawaban dana otonomi khusus senilai 0,01. Nilai tersebut dibawah 0,05 yang disyaratkan dalam pengujian ini. Nilai beta pada *Unstandardized Coefficients* yaitu 0,187. Berdasarkan hasil tersebut disimpulkan bahwa pertanggungjawaban dana otonomi khusus (X4) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja (Y) atau dengan kata lain hipotesis keempat (H₄) **diterima**.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Unit.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Ulupui (2005), Yaninda (2013) dan Nurhalimah (2013). Ketiganya menyimpulkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja.

Teori yang menyatakan bahwa dengan melibatkan individu dalam penyusunan anggaran akan meningkatkan kinerja tidak terdukung dalam penelitian ini. Pada penelitian ini pelibatan responden dalam penyusunan anggaran, kepuasan responden dalam perevisian

anggaran, frekuensi diskusi mengenai anggaran, pengaruh responden terhadap anggaran serta tingkat kepentingan kontribusi cenderung netral atauimbang. Hal ini mungkin terjadi karena partisipasi yang dilakukan merupakan partisipasi semu. Partisipasi semu merupakan kondisi dimana atasan memberikan kesempatan kepada bawahan untuk turut serta memberikan masukan, namun masukan tersebut diabaikan atau kurang dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan (Hayuwati, 2018). Timbul keraguan pada responden saat menjawab pertanyaan mengenai partisipasi penyusunan anggaran, sebab pelibatangannya hanya semu.

2. Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Kinerja Unit.

Berdasarkan hasil regresi linear berganda, didapatkan hasil bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Dengan kata lain peningkatan aksesibilitas laporan keuangan akan turut meningkatkan kinerja. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Hariyati (2013).

Kemudahan mengakses laporan terkait pemerintah daerah sudah dilakukan oleh Kabupaten Supiori. Seluruh isi laporan keuangan Pemerintah Daerah Supiori dipublikasikan dengan bahasa yang mudah dipahami tanpa ada yang ditutupi. Pertanggungjawaban laporan keuangan juga melibatkan tokoh masyarakat yang mewakili masyarakat umum, sesuai dengan peraturan mengenai otonomi khusus Papua mengenai Majelis Rakyat Papua (MRP) yang berperan

menyalurkan aspirasi masyarakat Papua. Namun untuk sistem informasi keuangan daerah belum bisa diakses dengan mudah melalui website resmi Pemerintah Daerah Supiori.

Kemudahan mengakses laporan keuangan tentu akan memudahkan pengguna laporan keuangan untuk mengetahui bagaimana laporan mengenai pengelolaan dana otonomi khusus. Dari laporan keuangan tersebut tercermin bagaimana pemerintah menggunakan dana otonomi khusus, sehingga para pengguna laporan keuangan dapat dengan mudah mengetahui bagaimana kinerja pemerintah. Oleh sebab itu kemudahan mengakses laporan keuangan akan meningkatkan kinerja pemerintah.

3. Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kinerja Unit.

Berdasarkan hasil regresi linear berganda, didapatkan hasil bahwa pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Dengan kata lain peningkatan aksesibilitas laporan keuangan seiring dengan peningkatan kinerja. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Nasir (2011) yang menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja. Selain itu hasil penelitian ini mendukung Herman (2013) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan.

Lingkungan pengendalian pemerintah Kabupaten Supiori dalam hal pelaporan serta pertanggungjawaban telah dilakukan dengan baik.

Pemerintah juga telah mampu melakukan penilaian mengenai risiko yang mungkin dihadapi. Aktivitas pengendalian berupa pemisahan tugas, otorisasi transaksi dan pengendalian fisik catatan telah dilakukan. Pemerintah Kabupaten Supiori juga menggunakan sistem informasi dan komunikasi serta melakukan pemantauan dalam setiap pelaksanaan kegiatan.

Pengendalian internal membantu mempresentasikan rencana, metode, dan prosedur yang digunakan dalam organisasi mencapai tujuan (Hayuwati, 2018). Pengendalian internal akan mempengaruhi serta mengawasi tercapainya tujuan dari otonomi khusus. Pengendalian internal juga mencegah kemungkinan buruk yang terjadi dengan menilai risiko. Kinerja menjadi sesuatu yang mendasar dalam upaya pencapaian tersebut. Sehingga pengendalian internal yang baik akan meningkatkan kinerja serta mengurangi adanya kecurangan.

4. Pengaruh Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus terhadap Kinerja Unit.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Putra (2013) dan Hariyati (2017) yang menyimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja. Penyusunan anggaran telah dilakukan sesuai peraturan yang berlaku disertai dengan kelengkapan dokumen pendukung. Pelaksanaan kegiatan telah jelas tujuan serta sumber pembiayaannya. Penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban dilakukan sesuai standar yang berlaku dan dapat dibandingkan.

Dasar dari pengukuran pertanggungjelasn dinilai dari seberapa bagusnya kinerja. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dana otonomi khusus dikelola dan pemerintah mempunyai kewajiban memenuhi hak masyarakat dengan melakukan pertanggungjelasn. Pertanggungjelasn akan memperlihatkan bagaimana kinerja pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga pemerintah akan melakukan kinerja dengan sebaik mungkin.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Partisipasi penyusunan anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja unit.
2. Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja unit.
3. Pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja unit.
4. Pertanggungjelasn dana otonomi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja unit.

SARAN

1. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Supiori.
Peningkatan kinerja dapat dilakukan dengan meningkatkan aksesibilitas laporan keuangan, pengendalian internal, dan pertanggungjelasn dana otonomi khusus.
2. Bagi penelitian selanjutnya.

- a. Populasi dan sampel penelitian lebih diperluas sehingga total responden akan lebih banyak dan tidak terbatas pada satu wilayah.
- b. Metode pengumpulan data tidak hanya menggunakan kuesioner, tetapi dengan tambahan wawancara agar data yang terkumpul bisa lebih akurat.
- c. Menambah variabel independen, sebab kinerja tidak hanya dipengaruhi oleh variabel tersebut.

Daftar Pustaka

- Anugriani, Mulya, 2014, “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep *Value for Money* pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Bone”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
- Badan Pemeriksa Keuangan, 2018, BPK Menyerahkan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus Kepada DPR, www.bpk.go.id, diakses 06 Januari 2019.
- Brownell, P., 1982, “Participation in The Budgeting Process, When it Works and When it Doesn’t”, *Journal of Accounting Literatur*, 1.
- Endi, Robert Na, 2018, Efektivitas Dana Otonomi Khusus Papua, Wawancara oleh CNN Indonesia dan dipublikasikan 7 Februari, pukul 12.20 WIB.
- Ferdiani, Destaria, 2012, “Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Manajerial Pegawai Sekertariat Daerah Provinsi Jawa Tengah: Komitmen Organisasi dan Persepsi Inovasi sebagai Variabel *Intervening*”, *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol 1 No.1.
- Haliah, 2012, “Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya”, *Disertasi Doktor FPS UNHAS*.
- Hanifah, Nurul, 2018, “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Internal terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money*”, *Repository UMY*.
- Hariyati, dkk., 2017, “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi serta Pengawasan terhadap Kinerja pada Badan Penanaman Modal Daerah BPMD”, *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)*, Vol. 2 No. 1.
- Hayuwati, T., dan Abdul Halim, 2018, “Pengaruh Partisipasi Anggaran, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Pengendalian Internal Terhadap Pertanggungjawaban Daerah Kabupaten Klaten”, *Simposium Nasional Akuntansi XXI*, Samarinda.
- Herman, L. A., 2013, “Pengaruh Keadilan Organisasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kecurangan (Studi Empiris pada Kantor Cabang Utama Bank Pemerintah di Kota Padang)”, *Jurnal Akuntansi*, Vol. 1 No. 1.
- Kementerian Keuangan, 2017, RUU APBN 2018, www.kemenkeu.go.id, diakses pada 27 Desember 2018 12:29.
- Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah, www.djpk.kemenkeu.go.id, diakses 12 Desember 2018 19:28.

- Laksono, Dave A.F., 2018, Otonomi Khusus dan Good Governance, Wawancara oleh Okezone dan dipublikasikan 31 Januari, pukul 15.08 WIB.
- Mangkunegara, A. A. Anwar Prabu, 2006, *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Refika Aditama.
- Mardiasmo, 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: CV Andi.
- Milani, K, 1975, "The Relationship of Participation In Budget Setting to Industrial Supervisee Performance and Attitude: A Field Study", *The Accounting Review*, Vol 50.
- Nasir, Azwir, dan Ranti Oktari, 2011, "Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar)", *Jurnal Ekonomi Universitas Riau*, Vol 19 No 02.
- Nazzaruddin, Ietje, dan Agus Tri B., 2017, *Analisis Statistik dengan SPSS*, Yogyakarta: Danisa Media.
- Nurhalimah, Darwanis dan S. Abdullah, 2013, "Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Aparatur Perangkat Daerah di Pemerintah Aceh", *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Aceh*, 2 (1).
- Poerwati, Tjahjaning, 2001, "Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Manajerial : Budaya Organisasi dan Motivasi sebagai Variabel Moderating", *Tesis*, Progra Pasca Sarjana Universitas Diponegoro (tidak dipublikasikan).
- Pratolo, Suryo, 2008, "Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Perwujudan Keadilan dan Kinerja Pemerintah Daerah: Sudut Pandang Aparatur dan Masyarakat di Era Otonomi Daerah", *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 9 No. 2.
- Putra, Deki, 2013, "Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial Satuan Perangkat Daerah", *Jurnal Akuntansi 1 (1)*.
- Republik Indonesia, 2001, Undang-Undang No. 21 Tahun 2001, "tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua", Sekretariat Negara, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2008, Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, "tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah", Republik Indonesia, Jakarta.
- Sedarmayanti, 2011, *Tata Kerja dan Produktivitas Kerja: Suatu Tinjauan Dari Aspek Ergonomi atau Kaitan Antara Manusia Dengan Lingkungan Kerjanya*, Bandung: Mandar Maju.

- Setiyanningrum, I, 2017, “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep *Value for Money* pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Yogyakarta”, *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*.
- Shende, Suresh, and Tony Bennet, 2004, “Transparency and Accountability in Public Financial Administration”, *Concept Paper 2*, UNPAN, United Nations.
- Ulupui, I. G. K., 2005, “Pengaruh Partisipasi Anggaran, Persepsi Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural, dan *Goal Commitment* terhadap Kinerja Dinas”, *Kinerja*, Vol 9 No 2.
- Yanida, Maria, dkk, 2013, “Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintahan”, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol 4 No 3.